

## DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

RUSLI AMRUL<sup>1)\*</sup>, NI NYOMAN YULIATI<sup>2)</sup>, I NENGAH ARSANA<sup>3)</sup>, ASYSYIFA SAFIA SAWALISARI<sup>4)</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

<sup>1)</sup>[rusliamr@gmail.com](mailto:rusliamr@gmail.com) (corresponding), <sup>2)</sup>[ninyomanyuliati@gmail.com](mailto:ninyomanyuliati@gmail.com), <sup>3)</sup>[inengaharsana2@gmail.com](mailto:inengaharsana2@gmail.com),  
<sup>4)</sup>[asyifasafiasawal@gmail.com](mailto:asyifasafiasawal@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Lombok Barat). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai OPD pada lingkup pemerintah kabupaten Lombok Barat. Sampel diambil menggunakan purposive sampling. Kriteria didasarkan pada pegawai dinas-dinas yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Masing-masing dinas diambil 5 responden yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas kepala dan bendahara bagian pengelolaan keuangan pada dinas- dinas kabupaten Lombok Barat, Staf bagian sistem informasi dan pihak lain yang paham terkait pengelolaan keuangan pada dinas-dinas kabupaten Lombok Barat. Kuesioner yang kembali dan dapat digunakan sebanyak 81 kuesioner pada responden yang berada di 21 dinas kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t diketahui secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Barat, sebaliknya sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Barat.

**Kata kunci:** Determinan, kualitas, laporan keuangan, pemerintah daerah.

### ABSTRAK

*This study aimed to analyze factors that influence the quality of local government financial statements (empirical study in OPD's Lombok Barat regency). The Population of this study is in the scope of the OPD's Lombok Barat regency that is involved in the financial administration of local. Samples were taken using purposive sampling. The criteria are based on the employess involved in the preparation of financial statements. Each of OPD is taken 5 (five) respondents involved in the preparation of financial satatements consisting of the head and treasurers of sub-section of finance service Lombok Barat regency, staff information system of sub-section of finance agancy and other staff who know related finance in agency Lombok Barat regency. Data obtained by distributing questionnaires to 81 respondents in 21 agency Lombok Barat regency. Based on the result of questionnaire processing using multiple linear regression analyze, t test known partially variable of human resource competence, the application of government accounting standards and, the utilization information technology affect quality of local government financial reporting Lombok Barat regency. Instiead of internal control system has no significant effect on the quality of the financial statements of the Lombok Barat regency*

**Keywords:** Determinants, quality, financial reports, local government

### PENDAHULUAN

Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong adanya pemberlakuan otonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 3 dan 5 terkait Sistem Informasi Keuangan Daerah mengartikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berlakunya otonomi daerah maka pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan dan

akuntabel yang berguna untuk menciptakan pemerintah yang bersih. Salah satu upaya dalam menciptakan pemerintah yang bersih adalah dengan mewajibkan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian serta pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terkandung di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ialah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan. Fakta yang terjadi di lapangan yang diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I (2021: 110 ) dari situs resmi BPK (<http://www.bpk.go.id>) menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan mengungkapkan 5.367 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern, yang meliputi 1.699 (32%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.498 (46%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.170 (22%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Selain permasalahan dari sistem pengendalian intern, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan 6.295 permasalahan terkait ketidakpatuhan, kepatuhan tersebut terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan yang berdampak pada finansial sebanyak 4.048 permasalahan senilai Rp 2,07 triliun dan penyimpangan administrasi yang tidak berdampak pada finansial sebanyak 2.247.

Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian intern yang sudah memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan dalam sistem pengendalian internnya, yaitu terhadap keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan IHPS I (2021: 111-115) menemukan beberapa kasus lemahnya SPI, yaitu:

- 1) Penyusunan laporan keuangan tidak/belum dilakukan sesuai dengan kebijakan/pedoman akuntansi dan pelaporan.
- 2) Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
- 3) Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai,
- 4) Entitas terlambat menyampaikan laporan.
- 5) Perencanaan kegiatan tidak memadai
- 6) Belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Pasal 33 Ayat 1 Tahun 2006 ditekankan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern. Dari fenomena yang sudah dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan sistem pengendalian intern yang baik pada entitas pemerintah tersebut. Terkait masalah pengendalian internal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), dengan mengoptimalkan SPIP diharapkan pengendalian intern semakin efektif sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan.

Disamping variabel sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintahan juga sangat erat kaitannya dengan kualitas LKPD. Hasil temuan audit BPK juga mengatakan masih banyaknya permasalahan dalam penyusunan LKPD yang tidak sesuai ketentuan (Standar Akuntansi Pemerintahan). Menurut Ramanda penerapan SAP berbasis akrual adalah untuk memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya, terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan. SAP basis akrual diyakini juga dapat memberikan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Informasi keuangan yang dihasilkan dari basis akrual dapat mengurangi kesempatan atas kecurangan dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja, serta mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas sektor publik (Darmawan, 2018).

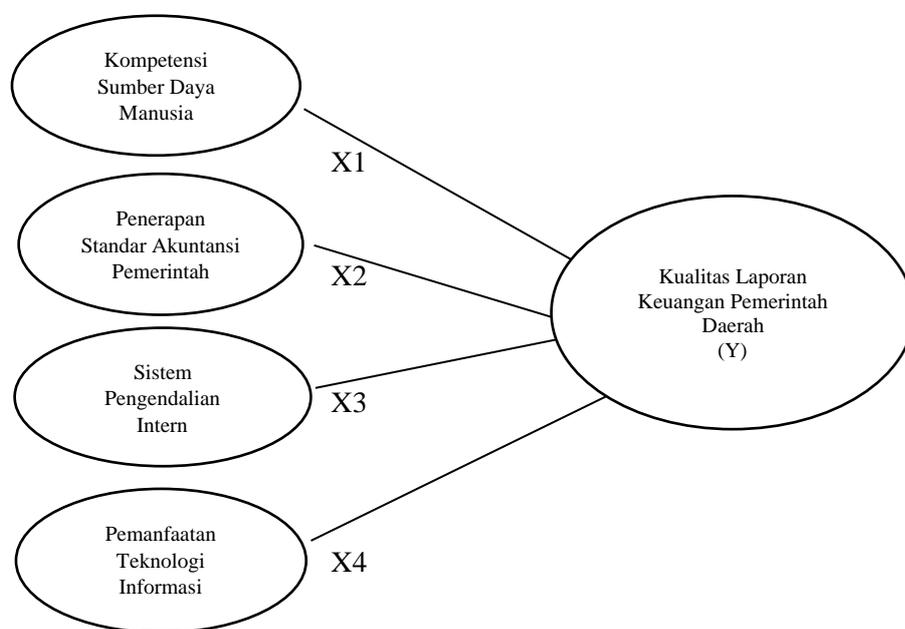
Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Adhi & Suardjo bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah, maka dari itu dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas, hal ini berarti kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah (Aritonang, 2018).

Salah faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah sehingga dapat memperoleh kualitas laporan keuangan yang handal adalah pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 terkait sistem informasi keuangan daerah, menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik, hal ini sejalan dengan dengan pendapat yang dikemukakan Hakim (2019) pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi manajemen dan proses kerja, memungkinkan pemerintah bekerja secara efektif dan efisien dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal akan memberikan kemudahan terhadap pekerjaan yang dilakukan, serta dapat meminimalisir tingkat kesalahan.

Alasan dipilihnya pemerintah kabupaten Lombok Barat sebagai lokasi penelitian, oleh karena berdasarkan pemeriksaan BPK yang bersumber dari berita yang diakses melalui (<https://lombokbaratkab.go.id/>) bahwa kabupaten Lombok Barat telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam kali berturut-turut dari tahun 2015 hingga tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Lombok Barat dapat mempertahankan opini audit yang diberikan kepada BPK RI. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini audit yang diterbitkan seluruh informasi dalam LKPD bebas dari salah saji material, dengan mendapatkan opini WTP dari BPK dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Barat sudah berkualitas dan disajikan secara wajar.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka peneliti tertarik mengambil variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi untuk melihat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat.

Dari penjelasan diatas maka model peneltian dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

### Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah “ apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat ?”.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat

### Hipotesis Penelitian

- H1 = Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.
- H2 = Penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.
- H3 = Sistem pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.
- H4 = Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian adalah asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyebarkan kuesioner kepada responden dimana pernyataan dalam kuesioner tertutup dibuat dengan skala 1-5 yaitu: Selalu, Sering, Kadang-kadang, Jarang, dan Tidak pernah, untuk mendapatkan data yang bersifat interval dan diberi nilai atau skor, misalnya untuk kategori pernyataan dengan jawaban selalu sampai dengan tidak pernah.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang memahami laporan keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) kabupaten Lombok Barat. Diantaranya 1 orang kepala bagian pengelolaan keuangan, 1 orang bendahara bagian pengelolaan keuangan, 1 orang staf bagian sistem informasi, 2 orang pihak lain yang paham terkait pengelola keuangan. Sehingga didapat populasi 210 pegawai yang diperoleh 5 orang dari masing-masing 42 OPD kabupaten Lombok Barat, adapun 42 OPD yang terdiri dari 21 dinas, 1 RSUD, 1 Sekretariat Daerah, 7 Badan, 9 Kecamatan, 1 DPRD, 1 Inspektorat Kabupaten, 1 PPID, 1 SATPOL PP.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan 21 OPD yaitu 21 dinas dengan metode penentuan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Kriteria penentuan sampel pada penelitian ini adalah Kepala bagian pengelolaan keuangan, bendahara bagian pengelolaan keuangan, staf bagian sistem informasi pengelolaan keuangan dan pihak lain yang paham terkait pengelola keuangan pada dinas – dinas kabupaten Lombok Barat, memiliki masa kerja minimal 2 tahun, pendidikan minimal tingkat SMA. Dalam penentuan jumlah sampel digunakan rumus perhitungan Slovin dengan tingkat error atau kesalahan yang dapat diterima sebesar 10%. Sedangkan penentuan jumlah sampel untuk setiap OPD ditentukan jumlah pegawai bagian pengelolaan keuangan pada satu OPD dibagi dengan total pegawai bagian keuangan di 21 OPD. Kemudian hasilnya dikalikan dengan hasil perhitungan dengan rumus Slovin yang telah dilakukan. Berdasarkan perhitungan sampel didapatkan jumlah sampel sebanyak 68 dan dibulatkan menjadi 100 responden dengan alasan semakin mendekati populasi maka akan semakin baik.

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data kuantitatif, Sugiyono (2021) mengatakan data kuantitatif ialah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer, dimana teknik pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui pengisian kuesioner yang disebarkan kepada beberapa aparatur dinas- dinas pemerintah daerah dan yang bekerja di lingkup pemerintah daerah Lombok Barat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi.

Teknik analisis data menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Analisis data yang digunakan adalah uji instrumen yaitu terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, statistik deskriptif. Sedangkan Uji asumsi klasik yaitu terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mencari pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia(X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), dan sistem pengendalian intern (X3) dan pemanfaatan teknologi informasi (X4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Model Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan:

Y= Variabel Y atau dependen, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah

$\alpha$ = konstanta

$b_1, b_2, b_3, b_4$  = koefisien regresi, yaitu peningkatan atau penurunan variabel yang didasarkan oleh variabel X1, X2, X3, X4

X1= Variabel independen, yaitu kompetensi SDM

X2= Variabel independen, yaitu penerapan SAP

X3= Variabel independen, yaitu sistem pengendalian internal

X4= Variabel independen, yaitu pemanfaatan teknologi informasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pendistribusian kuesioner kepada masing-masing OPD yaitu 21 OPD dinas-dinas di Kabupaten Lombok Barat dapat dijelaskan bahwa koesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner dan jumlah yang kembali sebanyak 88 kuesioner dengan 81 kuesioner yang memenuhi syarat responden atau yang dapat diolah, dan 7 kuesioner yang tidak dapat diolah disebabkan 3 kuesioner yang tidak memenuhi syarat responden dan 4 kuesioner

yang dikembalikan dalam keadaan kosong dan 12 kuesioner yang tidak kembali, hal ini dikarenakan banyaknya staf bagian keuangan yang sedang sibuk.

Dapat diketahui jumlah responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan responden berjenis kelamin laki-laki, dimana terdapat 51 orang berjenis kelamin perempuan atau 63%, usia pegawai OPD kabupaten Lombok Barat mayoritas yang berusia 31-40 yaitu 29 orang atau 35,8%, latar belakang pendidikan responden sebagian besar didominasi oleh Sarjana sebanyak 43 orang atau 53,1 % dari keseluruhan responden. Lulusan Akuntansi sebanyak 10 orang atau 12,3% responden dengan lulusan Manajemen sebanyak 14 orang atau 17,4%, lulusan Sosial dan hukum masing-masing 7 dan 3 atau 8,6% dan 3,7% dan sisanya 47 orang atau 58% diisi dengan lulusan Teknik sipil, Pertanian dan Ekonomi, sebagian besar responden mempunyai lama bekerja diatas 10 tahun sebanyak 56 orang atau 69,1% dari keseluruhan jumlah responden,

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki nilai signifikansi  $\leq 0,05$  dan pernyataan item dari masing-masing variabel memiliki nilai  $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel} = 0,218$  sehingga dapat dikatakan bahwa semua item pernyataan dalam kuesioner untuk kelima variabel dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's alpha* dari masing-masing variabel  $\geq 0,60$ , hal ini berarti bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

**Table 1. Uji Reliabilitas**

Variabel	Nilai Cronbach Alpha's	Jumlah Pernyataan	Keterangan
X1	0,810	22	Reliabel
X2	0,935	27	Reliabel
X3	0,876	8	Reliabel
X4	0,640	9	Reliabel
Y	0,861	11	Reliabel

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2022

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh varibale memiliki nilai rata-rata yang sudah baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Standar deviasi
Kompetensi SDM	81	3	5	3,86	,379
Penerapan SAP	81	4	5	4,12	,331
SPI	81	4	5	4,15	,357
Pemanfaatan TI	81	3	5	3,96	,431
Kualitas LKPD	81	4	5	4,41	,494

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2022

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05 yaitu 0,064. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Uji normalitas (kolmogorov-smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		Unstandardized Residual 81
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,000000
	Std. Deviation	2,82980860
Most Extreme Differences	Absolute	,096
	Positive	,096
	Negative	-,068
Test Statistic		,096
Asymp. Sig. (2-tailed)		,064 <sup>c</sup>

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2022

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar keempat variabel karena nilai VIF  $\leq 10$  dan tolerance  $\geq 0,1$  maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 4. Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kompetensi SDM	,646	1,549
Penerapan SAP	,706	1,417
SPI	,487	2,054
Pemanfaatan TI	,483	2,070

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2022

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa dalam model regresi linier berganda tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dilihat dari masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi yang  $\geq 0,05$ . Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5. Uji Park**

Model	t	Sig.
1 (Constant)	3,086	,003
Kompetensi SDM	,200	,842
Penerapan SAP	-1,611	,111
SPI	-1,211	,230
Pemanfaatan TI	-,264	,792

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2022

**Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	1,593	,811		1,965	,053
Kompetensi SDM	,603	,162	,463	3,732	,000
Penerapan SAP	,403	,160	,270	2,523	,014
SPI	,028	,157	,021	,181	,857
Pemanfaatan TI	-,327	,154	-,285	-2,120	,037

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2022

Berdasarkan uji regresi pada tabel 6 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.593 + 0,603X_1 + 0,403X_2 + 0,028X_3 - 0,327X_4.$$

Berdasarkan hasil uji regresi, diketahui bahwa masing-masing variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,191 atau 19,1% sumbangan pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 19,1%, sedangkan sisanya sebesar 80,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

**Table 7. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	Model Summary			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,481 <sup>a</sup>	,231	,191	,445

Sumber: Diolah SPSS 26, 2022

Hasil uji Parsial (Uji t) menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Barat, karena masing-masing variabel memiliki nilai t hitung  $\geq t$  tabel = 1,991 dan nilai signifikansi  $\leq 0,05$ . Sedangkan variabel sistem pengendalian intern tidak memiliki

pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Barat, karena nilai  $t$  hitung  $\leq$  tabel = 1,991 dan nilai signifikansi  $\geq$  0,05. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6.

### **Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah**

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa sumber daya manusia OPD kabupaten Lombok Barat sudah memenuhi kriteria sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dapat dilihat dari seberapa pengetahuan dan kemampuan khusus yang dimiliki setiap responden, pengetahuan dan kemampuan bisa dilihat dari latar pendidikan responden yang sebagian besar dilatarbelakangi oleh strata pendidikan yang baik yaitu Sarjana sebesar 53,1%, selain itu berdasarkan hasil penyebaran kuesioner bahwa sumber daya manusia OPD kabupaten Lombok Barat sudah memenuhi kriteria sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dilihat dari persentase jawaban responden terkait indikator kemampuan dan sikap yang menjawab di atas 13-38 orang atau 13%-46,9% yang menjawab sangat setuju, di atas 15-67 orang atau 18,5%-82,7% menjawab setuju, begitupun untuk indikator keterampilan bahwa responden di atas 2-41 orang atau 2,5%-50,6% menjawab tidak setuju dan di atas 4-36 orang atau 4,9%-44,4% menjawab kurang setuju terkait pernyataan kalimat negatif yang berbunyi "Tidak mampu dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan".

Berdasarkan Hasil uji parsial dan nilai signifikasinya yaitu nilai  $t$  hitung  $\geq$  tabel yaitu  $3,732 \geq 1,991$  dan nilai signifikansi  $\leq$  0,05 yaitu 0,000 maka  $H_0$  ditolak, dengan nilai koefisien regresi dari variabel kompetensi sumber daya manusia adalah 0,603 yang diketahui bernilai positif yang artinya artinya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Barat dan terdapat kecenderungan ketika kompetensi sumber daya manusia meningkat, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah & Muid (2014), Wati. Dkk (2014), Darmawan (2018), Baharsyah (2018), Afifah (2019), Muhlihah (2021) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa staf OPD kabupaten Lombok Barat telah mengerti dan menerapkan dengan baik standar akuntansi yang telah ditetapkan pemerintah, mengingat sebagian besar responden dilatarbelakangi oleh strata pendidikan yang cukup baik yakni Sarjana sebesar 53,1% dan sebagian besar memiliki pengalaman bekerja yang cukup lama  $\geq$  10 tahun sebesar 69,1 % dan sebagian besar memiliki umur yang masih tergolong muda sebesar 35,8% sehingga standar akuntansi pemerintah bisa dipahami dan diterapkan dengan maksimal, selain itu berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah pada OPD kabupaten Lombok Barat sudah baik dan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan pemerintah, dapat dilihat pada persentase jawaban responden di atas 48-75 orang atau 59,3%-92,6% menjawab setuju dan di atas 3-33 orang atau 3,7%-40,7% menjawab sangat setuju.

Berdasarkan Hasil uji parsial dan nilai signifikasinya yaitu nilai  $t$  hitung  $\geq$  tabel yaitu  $2,523 \geq 1,991$  dan nilai signifikansi  $\leq$  0,05 yaitu 0,014 maka  $H_0$  ditolak, dengan nilai koefisien regresi dari variabel penerapan standar akuntansi pemerintah adalah 0,403 yang diketahui bernilai positif yang artinya penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Barat dan terdapat kecenderungan ketika penerapan standar akuntansi pemerintah meningkat maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati. Dkk (2014), Darmawan (2018), Afifah (2019) dan Madyani. Dkk (2020) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Dilihat dari persentase jawaban responden di atas 9-24 orang atau 11,1%-29,6% menjawab sangat setuju dan di atas 56-72 orang atau 69,1%-88,9% menjawab setuju, selanjutnya 1 pernyataan berkalimat negative (butir pernyataan no.9) yang berbunyi "Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi", dari butir pernyataan ini bahwa 66 atau 81,5% responden menjawab setuju bahkan ada beberapa responden yang menjawab sangat setuju, meski dari segi jawaban responden rata-rata berada pada kategori setuju bahkan sangat setuju, namun berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan pemerintah daerah belum dilakukan secara maksimal. Menurut Diana Sari yang menyatakan bahwa penyebab lemahnya implementasi sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada umumnya terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur. Selain itu, para pejabat atau pelaksana yang bertanggung jawab lalai atau tidak cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas. Kelemahan SPI yang lain meliputi pejabat yang bertanggung jawab

lemah dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan dan belum sepenuhnya memahami ketentuan dan belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait (Tullah. Dkk, 2019).

Berdasarkan Hasil uji parsial dan nilai signifikasinya yaitu dengan nilai  $t$  hitung  $\leq$  tabel yaitu  $0,181 \leq 1,991$  dan nilai signifikansi  $\geq 0,05$  yaitu  $0,857$  maka  $H_0$  diterima yang artinya bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Barat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aritonang (2018), Afifah (2019), Baharsyah (2019) dan Tullah. Dkk (2019), bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurillah & Muid (2014), Madyani. Dkk (2020), Fauzi (2020), Muhlihah (2021) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa OPD kabupaten Lombok Barat sudah diterapkan dengan baik dari segi proses pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara terkomputerisasi dan teknologi yang tersedia sudah mencukupi, hal ini dapat dilihat dari persentase jawaban responden yang menjawab diatas 24-62 orang atau 29,6%-76,5% yang menjawab setuju dan 1-28 orang atau 1,2%-34,6% menjawab sangat setuju. Namun dilihat dari pernyataan butir nomor 4 berbunyi "Instansi/lembaga tidak memanfaatkan jaringan internet yang sesuai dengan kebutuhan", dari butir pernyataan ini responden menjawab 28 orang menjawab setuju dan 1 orang menjawab sangat setuju, yang artinya memanfaatkan jaringan internet dengan tidak untuk kebutuhan instansi/lembaga yang digunakan secara berlebihan akan berdampak pada menurunnya kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Barat.

Hasil pengujian Berdasarkan Hasil uji parsial dan nilai signifikasinya yaitu nilai  $t$  hitung  $\geq$  tabel yaitu  $-2,210 \geq -1,991$  dan nilai signifikansi  $\leq 0,05$  yaitu  $0,037$  maka  $H_0$  ditolak, dengan nilai koefisien regresi dari variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah  $-0,327$  yang diketahui bernilai negatif yang artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Barat dan terdapat kecenderungan ketika pemanfaatan teknologi informasi meningkat maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurillah & Muid (2014), Aritonang (2018) dan Baharsyah (2019) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada rumusan masalah serta tujuan dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan adalah sebagai berikut: *pertama*, Secara parsial kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Barat. *Kedua*, Secara parsial penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Barat. *Ketiga*, Secara parsial sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Barat. *Keempat*, Secara parsial pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Barat.

### **Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat untuk lebih memperhatikan aspek dari penggunaan terhadap teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi yang baik sangat dibutuhkan agar mampu bekerja lebih efektif dan efisien dikarenakan aspek tersebut mempengaruhi pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Barat. Serta memaksimalkan sistem pengendalian internnya dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dengan lebih cermat dan optimal. Selain itu untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah untuk memasukkan faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

AdminWeb Lobar." 10 Kabupaten/Kota Se-NTB Raih WTP, BPK Beri Catatan" <https://lombokbaratkab.go.id/> . Last Modified May 28, 2018. <https://lombokbaratkab.go.id/10-kabupatenkota-se-ntb-raih-wtp-bpk-beri-catatan/>

- Afifah, Riana Anggraeni (2019). *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)*.
- Aritonang, Jeremia S.P. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Baharsyah, Ridho (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kota Medan)*.
- BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun, 2021, Buku I Pemeriksaan Laporan Keuangan, [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).
- Damawan, Bobi (2021). “*Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara*”.
- Darmawan, Ariefsetya (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Fauzi, Muhammad Suci Reza (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan)*.
- <https://peraturan.go.id/id/pp-no-60-tahun-2008>
- <https://peraturan.go.id/id/pp-no-56-tahun-2005>
- Hakim, Wildan Lukmanul (2019). “*Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman*”. Yogyakarta.
- <https://ppid.lombokbaratkab.go.id/opdlobar>
- Madyani, S. P., Annie, M., Anriva (2020), Della Hilia. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru*. Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol. 10 No. 1.
- Muhlihah (2021), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jambura Accounting Review, Volume 2 No. 1 Hal. 76 – 86.
- Nurillah, As Syifa & Muid, Dul (2014) *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)*. Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 3
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49722/pp-no-56-tahun-2005>.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49029/pp-no-8-tahun-2006>.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010.pdf>.
- Sugiyono (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; ALFABETA.
- Tullah, Dewi Sarifah. Apriyanti, Erma. Suryanti, Emi (2019). *Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi, Vol. 8, No. 2.
- Wati. K. D., Herawati, N. T., Sinarwati, N. K. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sap, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2 No. 1.